



**PERANAN DEPATI AMIR DALAM PERANG MELAWAN
KOLONIAL BELANDA TAHUN 1848-1850 DI PULAU BANGKA**

Tesis

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Magister Humaniora (M. Hum)
dalam Program Studi Sejarah Peradaban Islam
Konsentrasi Islam di Indonesia

Oleh:

Pitria

NIM. 2110301151

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
2014**

BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Nama Bangka berasal dari kata *wangka* yang berarti timah. Hal tersebut, dilihat dari tulisan yang ditemukan dalam prasasti Kotakapur dekat sungai Menduk masa Kerajaan Sriwijaya (Syah 1995: 50). Dalam prasasti Kotakapur tercantum tahun 608 Saka atau 686 Masehi (Iskandar 1992: 16)). Prasasti Kotakapur dilengkapi dengan prasarana tempat ibadah (candi) dan benteng tanah (Sani 2010: 27). Letaknya pun sangat strategis di sekitar jalur perlintasan kapal-kapal yang berlayar dari arah selat Malaka maupun laut Tiongkok Selatan menuju laut Jawa hingga kawasan Timur Nusantara, demikian juga sebaliknya (Novita 2010: 116).

Prasasti Kotakapur menjelaskan bahwa pulau Bangka belum lama ditaklukkan oleh tentara Sriwijaya. Pada waktu itu tentara Sriwijaya hendak melakukan ekspedisi ke pulau Jawa, maka terlebih dahulu melewati pulau Bangka. Dapat dikatakan bahwa pulau Bangka merupakan batu loncatan bagi Kerajaan Sriwijaya untuk menyerang tanah Jawa (Machmud 1986: 6-7). Hal tersebut, sesuai dengan bunyi baris-baris terakhir dari prasasti Kotakapur.

Sebagian orang mengatakan bahwa nama Bangka berasal dari pemberian seseorang bangsawan Bugis bernama Seri Gading yang datang ke pulau Bangka dengan menggunakan perahu besar yang diiringi oleh segenap anak buahnya. Kemudian Seri Gading melanjutkan perjalanannya ke Johor, dalam perjalanan tersebut kapalnya mengalami kerusakan akibat banyaknya muatan. Oleh sebab itu, ia meminta bantuan kepada Sultan Johor agar memperbaiki kapalnya yang rusak. Setelah kapalnya selesai diperbaiki oleh pihak Sultan Johor, Seri Gading dan rombongan kembali lagi ke negeri asalnya (Supriyanto et.al 1996: 11).

Dalam perjalanan pulang, kapal Seri Gading mengalami musibah akibat angin ribut dan terdampar di sebuah pulau yang tidak berpenduduk. Dalam perjalanan mengelilingi pulau, Seri Gading dan pengikutnya menemukan rumah kecil (pondok) dan di belakang pondok ia menemukan sepasang mayat yang telah membusuk. Oleh sebab itu, Seri Gading menyebut daerah tersebut dengan daerah bangkai dan pada akhirnya timbul nama Bangka (Supriyanto et.al 1996: 12314). Selain itu, penduduk Bangka berasal dari daerah pulau Jawa (Mataram, Banten, Majapahit), suku Melayu (Siantan, Johor, Lingga), Cina (kuli kasar dan para staff), suku Laut (nelayan dan *lanun*) dan orang bukit atau orang gunung.

Berdasarkan pendapat di atas, penulis setuju dengan pendapat yang dikemukakan oleh Syah et.al mengenai kapan pulau Bangka ditemukan. Dengan alasan, bahwa prasasti Kotakapur yang dianggap relevan untuk dijadikan bukti. Prasasti merupakan salah satu peninggalan sejarah yang berbentuk catatan tertulis. Seorang sejarawan ingin mengungkapkan kehidupan sosial, ekonomi maupun budaya masyarakat pada masa lampau, maka ia harus menemukan peninggalan-peninggalan yang berkaitan dengan peristiwa masa lampau, baik itu tertulis maupun tidak tertulis.

Lemahnya kekuatan Kerajaan Sriwijaya dimanfaatkan oleh Kerajaan Majapahit, sehingga Kerajaan Sriwijaya mampu ditaklukkan oleh Kerajaan Majapahit (Safwan 2004: 31). Hal tersebut, berakibat putusnya hubungan Bangka dengan Kerajaan Sriwijaya. Namun, Kerajaan Majapahit sedikit sekali memperhatikan pulau Bangka, karena pulau tersebut tidak mampu mendatangkan hasil yang berarti bagi Kerajaan Majapahit (Yuda 1986: 226). Selain itu juga, Kerajaan Majapahit mulai tenggelam dengan datangnya pengaruh Islam di pulau Jawa.

Setelah tenggelamnya Kerajaan Majapahit, pulau Bangka berada di bawah kekuasaan Palembang. Ketika itu terjadi perkawinan antara Khodijah seorang putri dari Bupati Nusantara yang menguasai pulau Bangka dengan Ki Mas Hindi atau Sultan

Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidil Iman. Setelah terjadinya pernikahan, secara sistematis pulau Bangka berada di bawah Kesultanan Palembang (Yuda 1986: 230).

Ki Mas Hindi melakukan hubungan kontrak perdagangan dengan bangsa-bangsa Eropa. Dasar adanya hubungan kontrak perdagangan semenjak adanya kontrak tahun 1662 (Faille 1971: 23). Dalam kontrak tersebut, Ki Mas Hindi mengharapkan adanya Loji Belanda yang berseberangan dengan Keraton Palembang. Lalu Belanda mendirikan Loji sungai Aur yang berseberangan dengan Keraton Palembang (Hanafiah 1995: 193).

Pada masa Kesultanan Palembang di bawah pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin Jayawikrama ditemukannya timah di pulau Bangka (Machmud 1986: 34). Setelah timah ditemukan, pulau tersebut merupakan salah satu pulau penting di Indonesia, khususnya untuk Kesultanan Palembang Darussalam (Safwan 2004: 31).

Hasil tambang tersebut, merupakan barang komoditi yang sangat menguntungkan pihak Kesultanan Palembang Darussalam. Sultan dapat mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri (Utomo 2005: 189). Sultan menjual timah kepada kompeni (VOC), yang mendapat hak monopoli sejak tahun 1722. Sejak itulah penduduk Bangka menikmati kesentosan dan kesejahteraan berpuluh-puluh tahun lamanya (Bakar 1995: 1).

Produksi timah semakin hari semakin meningkat pesat, sehingga pihak VOC tidak sanggup membeli timah lebih dari kontrak tersebut. Hal inilah, yang kemudian hari menyebabkan timbulnya segala macam kecurangan dan penyelundupan serta pembajakan. Penyelundupan dan pembajakan mengakibatkan kekacauan-kekacauan di pulau Bangka. Kekacauan-kecauan tersebut baru berakhir dengan peperangan di pulau Bangka. Serangan-serangan tersebut, mulai berangsur berkurang semenjak tahun 1804. Namun, perebutan pulau Bangka tidak berhenti begitu saja (Bakar 1995: 2).

Sebelum menduduki pulau Jawa, Thomas S. Raffles mengadakan berbagai pendekatan kepada raja-raja di Nusantara. Raja-raja tersebut memiliki pengaruh besar terhadap wilayah Nusantara (Hanafiah: 1989: 13). Hal ini terbukti setelah keberhasilan Inggris menguasai pulau Jawa. Thomas S. Rafles memerintahkan Mayor Jendral Gillespie merebut Palembang dengan dalih hendak meminta pertanggung jawaban Sultan Mahmud Badaruddin II atas terbunuhnya orang-orang Belanda di Loji sungai Aur pada tahun 1811 dan Loji sungai Aur dibakar habis hingga rata dengan tanah (Abdullah 1997: 61). Dalam perjalanan tersebut, utusan Thomas S. Rafles melakukan perundingan dengan adik Sultan Mahmud Badaruddin II yang bernama Ahmad Najamuddin. Keberhasilan Inggris mengalahkan Sultan Mahmud Badaruddin II melalui politik *Devide et Impera* atau politik adu domba (Atja 1995: 7). Keberhasilan politik *Devide et Impera* oleh Inggris terlihat dari turunnya Sultan Mahmud Badaruddin II sebagai sultan Palembang (Sudarmanto 1992: 142).

Palembang resmi jatuh ke tangan Inggris pada akhir bulan April 1812. Kemudian Inggris mengangkat Ahmad Najamuddin menjadi sultan Palembang dan pulau Bangka serta Belitung berada di bawah kekuasaan Inggris (Bakar 1995: 3). Pihak Inggris ingin menguasai Bangka karena pulau Bangka belum pernah diklaim oleh bangsa-bangsa Eropa. Jika terjadi sesuatu hal yang tidak diharapkan, seperti penyerahan kembali pulau Jawa kepada pihak musuh. Inggris tidak perlu menyerahkan pulau Bangka dan sekitarnya. Dengan alasan, bahwa pulau Bangka dan sekitarnya bukan merupakan jajahan negara manapun (Mahruf 1999: 157).

Pada masa kekuasaan Inggris, pulau Bangka diganti dengan nama *Duke of Yor'k Island* dan Mentok diganti dengan nama *Minto*. Inggris mengutus seorang residen untuk menjaga keamanan Palembang dan Bangka, lalu diutuslah Mayor Meares (Isa 2008: 44). Mayor Meares bersama dengan Pangeran Muhammad dan Abang Abdurrauf melakukan penyusunan rencana untuk menyerang kubu pertahanan Sultan Mahmud

Badaruddin II. Namun, Mayor Meares tertembak peluru dalam peristiwa tersebut sehingga pasukannya kembali ke Mentok (Machmud 1986: 69).

Setelah Mayor Meares wafat, residen digantikan oleh Mayor Robinson. Ia menggunakan kebijakannya untuk mengangkat kembali Sultan Mahmud Badaruddin II sebagai sultan Palembang (Hanafiah 1989: 66). Dalam pengangkatan kembali Sultan Mahmud Badaruddin II, ia harus membayar uang sebesar empat puluh laksa ringgit atau satu juta gulden untuk menempati Kuto Besak dan membayar 400.000 real Spanyol sebagai pengganti biaya ekspedisi ke Palembang serta ganti rugi 20.000 real (Akib 1969: 45). Meskipun pengangkatan kembali Sultan Mahmud Badaruddin II sebagai sultan hanya dalam kurun waktu dua bulan.

Kacaunya sistem politik Kesultanan Palembang diakibatkan adanya campur tangan dari pihak asing dan suatu keadaan yang dramatis yang diciptakan sebagai salah satu upaya untuk menghancurkan sistem kekuasaan yang sah. Pada akhirnya menyebabkan terjadinya pemberontakan-pemberontakan. Kekacauan ini disebabkan adanya keinginan dari pihak asing untuk menguasai pulau Bangka sebagai penghasil produksi timah agar menambah perekonomian mereka setelah perang di belahan Eropa (Yuda 1986: 232).

Rakyat melihat kedatangan bangsa asing akan menambah kesengsaraan penduduk pribumi pulau Bangka. Kesengsaraan tersebut bertambah dengan adanya penguasaan Belanda di pulau Bangka. Penguasaan Belanda secara utuh atas pulau tersebut, setelah adanya penyerahan kekuasaan dari tangan Inggris ke tangan pemerintah Belanda. Penyerahan dilakukan di Mentok Bangka pada tanggal 10 September 1816 (Adjin 1992: 9). Pemerintah Belanda menurunkan Sultan Ahmad Najamuddin dari tahtanya dan mengangkat kembali Sultan Mahmud Badaruddin II sebagai sultan Palembang. Pemerintah Belanda memberi syarat kepada Sultan Mahmud Badaruddin II agar

mengganti rugi atas pembunuhan orang-orang Belanda di Loji sungai Aur dan mengakui kekuasaan Belanda di Palembang (Safwan 2004: 66).

Kedatangan kolonial Belanda di Pulau Bangka disambut masyarakat dengan penuh kecurigaan serta sikap permusuhan. Apalagi kedatangan mereka dianggap hanya memperkosa hak-hak rakyat, mengeruk hasil bumi dan timah sebanyak-banyaknya demi kepentingan mereka (Gadjahnata 1986: 233). Hal tersebut, membuat rakyat Bangka merasa ditindas oleh pemerintah Belanda.

Penindasan yang dilakukan pemerintah Belanda menyebabkan kesengsaraan pada rakyat. Mereka ingin keluar dari jajahan, tetapi belum punya keberanian dengan alasan:

- a. Belanda lengkap dengan persenjataan yang modern
- b. Belanda berhasil menerapkan politik adu domba
- c. Banyak rakyat pribumi yang memerangi rekannya (Yatim 2005: 240).

Penindasan yang dilakukan oleh pihak Belanda kepada masyarakat pulau Bangka pada awalnya tidak dihiraukan oleh rakyat. Karena mereka takut kepada pihak Belanda. Namun, rakyat melihat semakin hari pihak Belanda semakin sewenang-wenang saja kepada mereka. Penindasan-penindasan tersebut, kemudian mendapat perlawanan dari rakyat (Rahim 1998: 64-65). Perlawanan tersebut mendapat dukungan dari tokoh lokal setempat (elit tradisional). Karena mendapat dukungan dari para elit tradisional, sehingga rakyat berani melakukan perlawanan kepada pihak musuh. Mereka melakukan perlawanan dengan tujuan untuk membebaskan diri dari pemerintah Belanda.

Sebab-sebab perlawanan rakyat terhadap pemerintah Belanda:

1. Penindasan yang dilakukan pemerintah Belanda terhadap rakyat Bangka menyebabkan penderitaan, kesengsaraan dan kekacauan.
2. Pemerintah Belanda menjalankan sistem kerja paksa kepada rakyat Bangka, sehingga rakyat mengalami kelaparan dan kemiskinan (Machmud 1986: 74).

3. Peraturan monopoli timah oleh pihak Belanda yang menyebabkan adanya eksploitasi timah secara besar-besaran.
4. Perekonomian rakyat semakin hari semakin memprihatinkan. Mereka menggunakan pakaian kulit kayu, makan serba kekurangan dan kadang-kadang mereka mencari buah-buahan di dalam hutan (Bakar 1995: 20)
5. Adanya rasa senasib-sepenanggungan yang hidup dalam cengkeraman penjajah, sehingga muncul semangat bersatu (Sudiyo 2002: 14).
6. Belanda tidak mengakui sistem adat dan hukum yang berlaku di dalam masyarakat Bangka.
7. Penuntutan keluarga Depati Amir atas hak-haknya yang tidak dijalankan oleh pihak Belanda berdasarkan kesepakatan antara pihak Amir dan pemerintah Belanda. Hak-hak tersebut dituntut demi menjaga harga diri dan status yang dimilikinya (Erman 2009: 61).

Perlawanan-perlawanan sengit antara rakyat Bangka dengan pemerintah Belanda tidak terlepas dari peran depati, *batin* maupun tokoh lokal yang berkuasa di pulau Bangka. Pertempuran sengit tersebut dimulai pada tahun 1819. Pertempuran pertama terjadi di Bangkakota di bawah pimpinan Depati Bahrin, dalam pertempuran tersebut pasukan Belanda mampu dipukul mundur hingga Mentok. Sedangkan dalam pertempuran kedua, pihak Belanda berhasil membumihanguskan Bangkakota dengan membawa pasukan yang lebih banyak dengan persenjataan yang lengkap. Dalam pertempuran tersebut, memakan korban dari pihak Belanda maupun dari pihak Bangka (Machmud 1986: 76).

Depati Bahrin meminta bantuan kepada sultan Palembang, namun sultan tidak bisa memberikan bantuan. Palembang sendiri ketika itu sedang melakukan perang terhadap Belanda. Meskipun sultan Palembang tidak mengirim pasukan untuk

membantu rakyatnya di pulau Bangka. Semangat juang para elit tradisional untuk melakukan perubahan terhadap rakyat tidak berhenti begitu saja (Erman 2009: 55).

Pihak Belanda terus menambahkan armada perang di pulau Bangka, sehingga rakyat dan Depati Bahrin tidak bisa melakukan perlawanan secara frontal. Hal tersebut, disebabkan Belanda lengkap dengan persenjataan dan para serdadunya sangatlah terlatih. Depati Bahrin dan pasukan mengubah perlawanan tersebut dengan jalur peperangan terbuka. Ia mengubah taktik perlawanan dengan sistem perang Gerilya. Dengan cara membuat pangkalan-pangkalan bagi pasukan di rimba raya (Bakar 1995: 14).

Taktik gerilya yang digunakan oleh Depati Bahrin dan pasukan membuat Belanda merasa kesusahan dalam usaha penangkapan tersebut. Belanda merasa kesusahan untuk melawan Depati Bahrin karena ia dibantu oleh rakyat, kuli Cina maupun kaum *lanun* (bajak laut). Kemudian Belanda memberi sayembara kepada siapa yang mampu menangkap Depati Bahrin hidup atau mati, maka mereka akan diberikan hadiah. Namun, rakyat Bangka tidak memberitahu keberadaan Depati Bahrin (Erman 2009: 56).

Cara yang dilakukan Belanda tidak berhasil untuk menangkap Depati Bahrin. Lalu pemerintah Belanda mengubah taktiknya dengan melakukan perdamaian kepada Depati Bahrin. Dalam perjanjian perdamaian tersebut, pihak Belanda akan memberikan tunjangan kepada pihak Depati Amir, jika mereka tidak melakukan pemberontakan lagi. Depati Bahrin menerima tunjangan tersebut, bukan berarti berakhir sebuah perjuangan kepada rakyat. Perjuangan Depati Bahrin dilanjutkan oleh putra sulungnya bernama Depati Amir. Ia diangkat oleh pemerintah Belanda sebagai depati di pulau Bangka menggantikan ayahnya pada tahun 1830 (Erman 2009: 57).

Perjuangan untuk melawan kaum penjajah (Belanda), tidak berhenti begitu saja. Sebab peranan seseorang akan menimbulkan perubahan sistem sosial yang terjadi dalam masyarakat Bangka. Seperti suatu kelompok yang dipimpin oleh pemerintah Belanda menjalankan tugas mereka untuk melakukan kesewenangan kepada rakyat. Pemerintah

Belanda melakukan kekerasan sehingga rakyat semakin hari semakin menderita. Rakyat bisa keluar dari seorang pemimpin tirani dan kaum penjajah, jika mereka dibantu oleh individu atau kelompok yang memperhatikan keadaan mereka.

Adanya sistem lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial yang terjadi pada masyarakat Bangka, sehingga menimbulkan perubahan norma-norma yang ada. Sistem lapisan masyarakat memiliki dua unsur, yaitu kedudukan dan peranan (Soekanto 2010: 213). Menurut Gross, Mason dan Mc Eachern, peranan merupakan suatu harapan yang dikenakan individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan merupakan imbalan dari norma-norma sosial atau bisa dikatakan bahwa peranan ditentukan oleh norma-norma yang ada dalam masyarakat (Berry 1983: 99). Teori Gross, Mason dan Mc Eachern sama dengan teori yang dikemukakan oleh Soekanto bahwa peranan seseorang atau kelompok sangat menentukan norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.

Soekanto menjelaskan lebih rinci mengenai peranan dalam sistem masyarakat ada tiga hal. Pertama, ia sependapat dengan Gross, Mason dan Mc Eachern bahwa peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Kedua, ia mengatakan bahwa peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dikemukakan oleh individu dalam masyarakat. Ketiga, peranan sebagai individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Soekanto 2010: 217). Selain itu, Parsons mengemukakan lebih lanjut mengenai peranan seseorang dalam sistem lapisan tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan oleh Gross, Mason, Mc Eachern dan Soekanto.

Menurut Parsons, peranan terdiri dari dua macam harapan. Pertama, harapan bagi masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban dari pemegang peran. Kedua, harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajibannya (Berry 1983: 101). Dalam kasus ini, Parsons percaya bahwa peranan dan

kedudukan seseorang dalam masyarakat mampu memberikan harapan kepada masyarakat agar adanya perubahan yang lebih baik dari segi ekonomi, politik maupun sosial. Dalam hal ini, peranan dan kedudukan yang diberikan kepada Depati Amir diharapkan mampu mengubah keadaan masyarakat Bangka yang tertindas. Perubahan tersebut, dapat dilakukan melalui perlawanan bersenjata.

Perlawanan yang dilakukan oleh Depati Amir kepada pihak Belanda berkaitan erat dengan masalah pribadi yang terjadi dalam keluarganya (Bakar 1995: 30). Depati Amir kecewa terhadap kongsi Belanda di Distrik Sungailiat yang tidak memenuhi tuntutan keluarganya atas perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Dalam perjanjian tersebut, pihak Belanda akan memberikan tunjangan kepada keluarga Amir sebesar f 150. Namun, tuntutan tersebut tidak dipenuhi oleh pihak Belanda. Menurut Depati Amir, sebagai ahli warisnya mereka berhak atas tunjangan tersebut (Bakar 1995: 23).

Ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda terhadap keluarga Depati Amir. Seperti tidak memenuhi janji yang telah disepakati di antara kedua belah pihak tentang hak-hak yang harus didapatkan oleh Depati Amir dan keluarganya sebagai ahli waris dari Depati Bahrin. Menurut Moore, ketidakadilan disebabkan ada tiga masalah dalam kelompok, yaitu otoritas, pembagian kerja dan distribusi barang dan jasa (yaitu perwujudan kesamaan). Ketidakwajaran tersebut, pertanda bahwa adanya ketidakadilan. Secara hipotesis dapat diperkirakan bahwa ketidakadilan menyebabkan berbagai reaksi yang terjadi. Mulai dari sikap apatis rakyat sampai dengan melakukan perlawanan (Abdullah 2010: 325). Bentuk perlawanan yang dilakukan adalah melalui peperangan yang dianggap mampu untuk menuntut keadilan bagi keluarganya.

Selain itu, Depati Amir menuntut Djambil untuk membayar denda karena telah mengganggu saudaranya Ipah. Dari dua insiden di atas, dapat disimpulkan bahwa sikap anti kolonial Depati Amir bertujuan untuk mempertahankan status, harga diri dan hak-

haknya yang sudah dirampas oleh pihak Belanda. Bentuk anti kolonial Depati Amir terlihat atas keberhasilannya dari kepungan polisi bersenjata dan ia mampu mengorganisir rakyat agar melakukan protes terhadap pemerintah Belanda (Erman 2009: 59-60).

Di lain pihak, Belanda memberi tugas kepada administratur Pangkalpinang untuk menangkap Depati Amir. Pimpinan penangkapan tersebut diserahkan kepada Jaksa Arifin. Namun, rencana dan gelagat Belanda diketahui oleh Depati Amir. Peristiwa penangkapan dijadikan Depati Amir dan rombongan sebagai awal dari permulaan untuk melakukan pemberontakan (Bakar 1995: 25-26). Salah satu pemberontakan yang dilakukan oleh Depati Amir dan pasukan adalah menangkap orang-orang yang bekerja dengan Belanda atau orang-orang yang berposisi sebagai perpanjangan tangan pemerintah kolonial Belanda di pulau Bangka.

Ketika itu, Depati Amir bersama pasukan akan menangkap Lamak putra Batin Mendo Timur di kampung Lukok. Di mana pada saat itu, Batin Mendo Timur merupakan seorang yang bekerja untuk pemerintah Belanda pada tahun 1848. Akibat adanya usaha penangkapan terhadap putra Batin Mendo Timur, keadaan pulau Bangka semakin memanas. Tindakan Depati Amir dan Anak buahnya yang radikal menimbulkan ketegangan-ketegangan di seluruh pulau Bangka. Dari sinilah, awal terjadinya pertempuran antara pihak Belanda dengan pihak Depati Amir (Erman 2009: 59-62). Depati Amir dan pasukan melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda disebabkan penderitaan, kesengsaraan, kezaliman dan ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak Belanda terhadap mereka. Kekecewaan mereka sudah menumpuk kepada pihak Belanda dan akhirnya meluaplah perang Bangka tahun 1848-1850 yang dikomandoi oleh Depati Amir.

Dalam peperangan tersebut, Depati Amir dan pasukan menggunakan taktik dan strategi perang gerilya yang dianggap mampu membuat pihak lawan kelelahan. Menurut

Guevera, bahwa ada dua macam bentuk perang yang dilakukan oleh seseorang. Pertama, suatu perjuangan yang melingkupi tentara tetap yang besar jumlahnya dalam bernegara. Kedua, perjuangan melawan kekuasaan negara (kolonial maupun bukan kolonial) yang berbasis di daerah pedesaan yang penduduknya sedikit (Guevera 2005: 5). Bentuk peperangan yang kedua terpaksa dilakukan karena adanya penindasan bangsa asing terhadap rakyat (Malaka 2000: 46). Untuk itulah rakyat memperjuangkan perubahan struktur dalam pemerintahan di pulau Bangka. Tujuan ideologi yang mengilhami perjuangan adalah tujuan ekonomi yang ditentukan oleh pihak asing.

Seorang pejuang atau panglima perang harus memiliki pengetahuan yang baik mengenai daerah yang akan dilakukan penyerangan. Jalan-jalan masuk dan jalan untuk meloloskan diri ketika dalam keadaan yang tidak terduga, tempat bersembunyi yang baik agar mendapat dukungan dari rakyat. Biasanya pejuang tersebut melaksanakan aksinya di daerah liar yang penduduknya sedikit. Karena daerah tersebut lebih memudahkan seorang pejuang untuk melakukan rencana perombakan struktur daerah tersebut (Guevera 2005: 6). Jika terjadi suatu hal yang tidak dikehendaki, seperti pihak musuh berani muncul di hadapan lawan. Pasukan lawan harus melakukan serangan dan kemudian mundur ke hutan. Taktik serang dan lari (*hit and run*) yang biasa dikenal dengan perang gerilya. Di mana dalam peperangan tersebut, siapa yang paling lama sanggup bertahan dalam peperangan tersebut, biasanya akan menang (Effendy 1974: 72).

Selain itu, seorang panglima perang harus mampu menganalisis kegiatan-kegiatan musuh, sumber daya yang ada pada musuh untuk mencapai sasaran itu: perlengkapan orang-orangnya, kecekatan gerakannya, dukungan massanya, persenjataannya, kemampuan seorang dalam memimpin. Para pejuang tersebut ingin menghancurkan susunan sistem pemerintahan lama dan merubahnya dengan susunan yang baru agar tercapai keadilan dan kesejahteraan yang merata bagi mereka (Guevera

2005: 7-9). Peperangan tersebut, awalnya dilatarbelakangi oleh penuntutan hak dan kewajiban serta status harga diri keluarga Depati Amir terhadap pemerintah Belanda. Kemudian perlawanan tersebut berkembang menjadi perlawanan untuk menuntut kebebasan dari penindasan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda kepada penduduk Bangka.

Penduduk pribumi melihat kekuasaan Belanda di pulau Bangka mengakibatkan terjadinya eksploitasi hasil bumi rakyat untuk pemerintah Belanda semakin merajalela dan terjadinya perampasan tanah milik rakyat demi kepentingan pemerintah Belanda (Sunanto 2010: 29). Hal tersebut membuat penduduk pribumi pulau Bangka dijajah dan mengakibatkan kehidupan mereka di bawah kemiskinan. Untuk keluar dari penjajahan tersebut harus mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai rakyat di pulau Bangka.

Dukungan untuk melawan pemerintah Belanda tidak hanya datang dari pendukung Depati Amir. Namun, perlawanan tersebut dibantu juga oleh *lanun* maupun kuli-kuli parit Cina. Kuli-kuli tersebut merasakan kalau pemerintah Belanda melakukan kerja rodi (kerja paksa) kepada mereka. Hasil yang mereka terima tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Akhirnya ketegangan-ketegangan itulah yang memunculkan perang Bangka melawan pemerintah Belanda di bawah pimpinan Depati Amir (Erman 2009: 63).

Selama berlangsungnya perang yang diakibatkan dari ketidakadilan yang dirasakan oleh individu atau kelompok tertentu dari kaum borjuis. Peperangan tersebut, merupakan suatu protes perlawanan rakyat terhadap pemerintah Belanda dan elit priyayi yang menjadi kaki tangan Belanda (Lapidus 1999: 21). Dalam peperangan itu memakan korban yang berjatuh di antara kedua belah pihak. Antara kaum yang bertikai saling membunuh demi terciptanya perubahan sosial maupun keinginan mereka untuk tetap berkuasa di daerah yang telah ditaklukkannya.

Keadaan tersebut muncul diakibatkan adanya suatu ketegangan struktur ataupun terjadinya suatu peristiwa yang dramatis (Gonggong 1992: 2). Seperti adanya ancaman ekonomi, perlakuan semena-mena yang dilakukan oleh kelompok orang berkuasa menimbulkan kemiskinan dan penderitaan, penuntutan hak-hak yang dilakukan oleh individu kepada kelompok demi mempertahankan status mereka. Dalam hal ini, peranan seseorang sangat menentukan kemenangan dalam berperang melawan musuh.

Menurut penulis, pasti ada nilai strategis yang timbul dari perang. Asumsi awal penulis, nilai strategis ini terkait masalah perekonomian dan penuntutan hak serta kewajiban ia sebagai seorang depati dan ahli waris dari Depati Bahrin. Oleh karena itu, perlu pengkajian yang lebih mendalam mengenai nilai strategis yang menjadi penyebab timbulnya perang yang dilakukan oleh Depati Amir kepada pihak Belanda. Selain alasan untuk mengungkapkan nilai strategis apa yang menyebabkan adanya peperangan tersebut. Alasan lain penulis memilih subjek ini adalah ketidakadilan yang dirasakan penduduk pribumi pulau Bangka, khususnya umat Islam. Karena mereka dipekerjakan sebagai buruh kasar dan pekerja rodi. Untuk keluar dari ketidakadilan tersebut, Depati Amir yang memegang jabatan sebagai depati dan sekaligus sebagai tokoh agama di daerah tempat tinggalnya. Kemudian Depati Amir mulai menorganisir masyarakat untuk ikut berperang melawan kaum penjajah atas nama perang jihad.

Kembali kepada pembahasan mengenai korban yang luka-luka dan wafat dalam peperangan tersebut, akibat timbulnya konflik antara para elit yang mendukung rakyat bawah dengan kaum borjuis. Peperangan tersebut tidaklah lepas dari peranan seseorang yang memiliki kedudukan dalam sistem sosial untuk melakukan perubahan. Alasan lain, timbulnya minat penulis memilih peranan Depati Amir dalam perang melawan kolonial sebagai subjek penelitian dan penulisan adalah perasaan dan keprihatinan disebabkan banyaknya korban yang jatuh selama peperangan terjadi. Tidak hanya itu, mereka yang tidak memberitahu di mana keberadaan Depati Amir menjadi sasaran kezaliman pihak

Belanda. Walaupun sebenarnya mereka tidak ikut andil dalam hal menyembunyikan Depati Amir dan pasukan. Mereka terus diinterogasi oleh pihak Belanda. Mereka hanyalah orang lemah yang tidak memiliki kemampuan untuk melawan para penjajah yang telah menyebabkan mereka hidup dalam kesengsaraan. Oleh karena itu, perlu dianalisis lebih mendalam mengenai peranan Depati Amir dalam perang melawan kolonial Belanda.

Dari berbagai latar belakang di atas, menumbuhkan minat penulis untuk memilih subjek penelitian dengan judul *“Peranan Depati Amir dalam Perang Melawan Kolonial Belanda Tahun 1848-1850 di Pulau Bangka”*.

Rumusan dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka sub-sub rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apa faktor yang menyebabkan perlawanan Depati Amir terhadap kolonial Belanda?
- b. Bagaimana kedudukan dan peran Depati Amir secara sosiologis dan politis?
- c. Bagaimana pengaruh perang Bangka terhadap kehidupan sosial masyarakat?

Agar penelitian ini tidak meluas dan melebar, sehingga tidak mancapai apa yang menjadi tujuan utamanya serta menghindari kesalahan pemahaman yang mungkin terjadi yang disebabkan karena keterbatasan waktu, dana dan lain-lain, maka penelitian ini hanya difokuskan pada peranan Depati Amir dalam perang melawan kolonial Belanda Tahun 1848-1850 pulau Bangka.

Tujuan Penelitian

Bertolak dari rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengungkap faktor apa saja yang menyebabkan perlawanan Depati Amir terhadap kolonial Belanda.
- b. Untuk mengetahui kedudukan dan peran Depati Amir secara sosiologis dan politis.
- c. Untuk mengetahui pengaruh perang Bangka terhadap kehidupan sosial masyarakat.

Kegunaan Penelitian

Lazimnya kegunaan penelitian untuk dua kepentingan, yaitu untuk pengembangan ilmu dan untuk *problem solving* (pedoman), maka kegunaan penelitian terdiri dari:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang luas tentang peranan tokoh perjuangan serta memberi informasi ilmu pengetahuan bagi masyarakat Bangka. Sebab sejarah tokoh lokal yang berperan penting dalam perjuangan melawan kolonial Belanda sangat sedikit yang menuliskannya.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan dan dapat dijadikan rujukan untuk mengetahui serta memahami tentang bagaimana peranan Depati Amir dalam perang melawan kolonial Belanda di pulau Bangka pada masa Keresidenan Palembang.

Definisi Operasional

Dalam kerangka konseptual ini penulis mendeskripsikan beberapa konsep utama yang menjadi fokus dalam penemuan data di lapangan, sehingga objek pembahasan tidak melebar keluar dari konsep terminologi (istilah) yang perlu dideskripsikan dalam penelitian ini yaitu, peranan, Depati Amir, perang dan kolonial.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, peranan berasal dari kata peran dan ditambah akhiran an. Peran adalah pelaku sebagai tokoh dalam sandiwara dan sebagainya (Harto 1992: 120). Sedangkan peranan adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pemimpin terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa (Tim Pustaka Phoenix 2009: 652).

Menurut istilah, peranan adalah seseorang yang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya (Soekanto 2010: 217). Peran merupakan fakta penentu apa yang seharusnya diperbuat oleh seseorang atau pemberi kesempatan bagi pemenangnya (Septiadi & Kolip 2011: 437). Dari definisi di atas, yang dimaksud dengan peranan dalam penelitian ini adalah seseorang yang memiliki kedudukan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di pulau Bangka.

Istilah Depati Amir berasal dari dua kata, yaitu depati dan Amir. Menurut bahasa Indonesia depati berarti kepala distrik (Mangunsuwito 2011: 113). Depati pada awalnya adalah raja-raja kecil di pedalaman. Mereka adalah kepala-kepala rakyat yang bebas. Mereka tidak mempunyai kewajiban membayar upeti kepada sultan Palembang. Namun, di belakang hari sebagai tanda dan hubungan dengan sultan mereka diwajibkan membayar tiban. Depati bertugas di daerah sindang atau daerah perbatasan dengan daerah kepungutan. Mereka berkewajiban melindungi perbatasan daerah Kesultanan dari serbuan orang luar (Rahim 1998: 64-65). Sedangkan Amir merupakan seorang putera sulung Depati Bahrin (Bakar 1995: 20). Dari definisi di atas yang dimaksud dengan Depati Amir dalam penelitian ini adalah seorang depati yang diangkat oleh Belanda pada tahun 1830 menggantikan posisi ayahnya Depati Bahrin. Daerah kekuasaannya berada di daerah Mendara dan Mentadai atau sebagian distrik Merawang.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, perang yang berarti memiliki makna sebagai permusuhan, pertempuran dan sebagainya dengan senjata antara negara, antara bangsa, perjuangan perkelahian, mengadu tenaga (Tim Pustaka Phoenix 2009: 652).

Dari definisi di atas yang dimaksud perang dalam penelitian ini adalah pertempuran yang dilakukan oleh seseorang untuk memperjuangkan hak dan kewajiban mereka sebagai seorang depati maupun rakyat di pulau Bangka yang menyebabkan kesengsaraan dan ketidakadilan.

Istilah kolonial berasal dari bahasa Yunani “*Colonus*” yang artinya petani. Istilah ini diberikan kepada para petani yang pindah dari negerinya yang tandus dan pindah ke daerah lain yang lebih subur. Menurut bahasa kata kolonial berasal dari kata koloni yang bermakna tanah jajahan (Muda 2006: 320). Kolonial adalah berhubungan dengan sikap jajahan: pemerintahan, mendirikan benteng dan menguasai jalur pelajaran di kepulauan itu (Depdiknas 2005: 582). Dari definisi di atas yang dimaksud dengan kolonial dalam penelitian ini adalah orang atau negara yang memiliki sifat menjajah, pernyataan tersebut tertuju pada kolonial Belanda yang berusaha menjajah tanah Bangka.

Berdasarkan beberapa pengertian dari konsep-konsep utama di atas, dapat digarisbawahi bahwa penelitian ini memfokuskan pada “*Peranan Depati Amir dalam Perang Melawan Kolonial Belanda Tahun 1848-1850 di Pulau Bangka*”.

Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang perjuangan tokoh lokal di pulau Bangka seperti Depati Bahrin sudah ada sebelumnya. Namun, penelitian yang meneliti tentang “*Peranan Depati Amir dalam Perang Melawan Kolonial Belanda Tahun 1848-1850 di Pulau Bangka*” belum ada. Penelitian ini tidak sempurna tanpa didukung oleh buku yang berkaitan dengan data penelitian.

Ahmad Elvian 2012, dengan judul penelitian: *Perang Bangka Tahun 1812-1851 Masehi*. Dalam penelitian tersebut, Elvian berusaha mengungkap bagaimana perjuangan Depati Amir kepada masyarakat Bangka dalam melawan pemerintah Belanda.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan peran apa yang dimiliki oleh Depati Amir dalam melawan Belanda. Di mana dalam penelitian tersebut, menjelaskan bahwa Depati Amir dengan sepenuh jiwa dan raga melawan penjajah. Hal itu terbukti dengan keberhasilannya dalam mengorganisir penduduk di daerah pedalaman pulau Bangka untuk melakukan perlawanan dalam bentuk perang. Peperangan dilakukan dalam rangka untuk mengangkat harga diri dan martabat mereka agar keluar dari penjajahan Belanda yang semena-mena.

Dari tela'ah atas tulisan terdahulu yang relevan belum ada yang membahas secara khusus mengenai Peranan Depati Amir dalam perang melawan kolonial Belanda, sehingga judul penelitian "*Peranan Depati Amir dalam Perang Melawan Kolonial Belanda Tahun 1848-1850 di Pulau Bangka*" layak untuk diangkat dalam penelitian ini.

Kerangka Teori

Pemerintah Belanda berhasil menguasai pulau Bangka setelah menaklukkan Palembang dari pihak Inggris. Penguasaan tersebut menyebabkan adanya perubahan sistem pemerintahan di pulau Bangka, baik secara politik maupun perekonomian. Perubahan tersebut, terlihat adanya pergeseran peran para elit tradisional. Kondisi ini melahirkan lembaga-lembaga baru dalam pemerintahan di pulau Bangka.

Adanya tingkatan golongan elit di pulau Bangka, melahirkan perubahan sosial di masyarakat. Menurut teori elit yang dikembangkan oleh Pareto, masyarakat dibagi ke dalam dua kelas. Pertama, lapisan atas, yaitu elit yang memerintah (*governing elite*) dan elit yang tidak memerintah (*non-governing elite*). Kedua, lapisan yang lebih rendah, yaitu non-elit (Varma 2007: 200).

Pareto menggunakan konsep sirkulasi elit. Dalam setiap masyarakat ada gerakan yang tidak dapat ditahan dari individu-individu dan elit-elit kelas atas hingga bawah dan

dari tingkat bawah ke tingkat atas yang melahirkan suatu peningkatan yang luar biasa pada unsur yang melorotkan kelas-kelas yang memegang kekuasaan dan pihak lain justru meningkatkan unsur superior pada kelompok lain. Hal ini, tersisihnya kelompok-kelompok elit yang ada dalam masyarakat dan akibatnya keseimbangan masyarakat pun menjadi terganggu (Varma 2007: 201). Seperti yang terjadi pada elit di pulau Bangka. Setelah kedatangan Belanda di pulau Bangka, para elit tradisional harus kehilangan kekuasaan. Mereka digantikan dengan para pejabat Eropa. Hal ini menyebabkan hilangnya simbol-simbol supremasi yang didapatkan dari sultan sebelumnya.

Teori elit politik juga dikembangkan oleh Gaetano Mosca (1858-1941). Ia menggunakan teori pergantian elit. Karakteristik yang membedakan elit adalah kecakapan untuk memimpin dan menjalankan kontrol politik, sekali kelas yang memerintah tersebut kehilangan kecakapannya dan orang-orang di luar kelas tersebut menunjukkan kecakapan yang lebih baik, maka terdapat segala kemungkinan bahwa kelas yang berkuasa akan dijatuhkan dan digantikan oleh kelas penguasa yang baru. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan yang tidak dapat dihindari. Seperti, penguasaan minoritas atas mayoritas dilakukan dengan cara terorganisasi, yang menempatkan mayoritas tetap berdiri saja di belakang, apalagi kelompok minoritas biasanya terdiri dari individu-individu yang superior (Varma 2007: 203-204).

Konflik elit politik di pulau Bangka menjadi sangat kompleks dan krusial ketika elit pedagang asing seperti Belanda ikut campur serta memberi pengaruh politik di daerah tersebut. Kehadiran Belanda sebagai pedagang, melahirkan elit baru di masyarakat dan menjadi elit tandingan. Akibatnya keseimbangan masyarakat terganggu dan menyebabkan semakin tersisihnya kelompok-kelompok elit tradisional yang ada dalam masyarakat.

Adanya elit baru turut melahirkan pertentangan antar elit. Pertentangan tersebut didasarkan atas khotomi pembagian wewenang dalam perserikatan yang dikoordinasi

secara memaksa dapat ditaruh sebagai asumsi dasar. Asumsi ini ditambahkan sebuah proposisi bahwa bahwa posisi yang dilengkapi dengan wewenang yang berbeda dalam perserikatan yang menyebabkan terjadinya pertentangan orang yang memegangnya. Antara pemegang posisi dominan dan pemegang posisi yang ditundukkan mempunyai kepentingan tertentu yang berlawanan substansi dan pelaksanaannya (Dahrendorf 1986: 21). Tujuan mereka untuk mengambil keuntungan dari posisi yang diduduki masing-masing. Seperti halnya yang terjadi pada masyarakat Bangka setelah penguasaan Belanda.

Dalam konteks ini, teori struktur fungsional menjelaskan bahwa masyarakat pada dasarnya merupakan jaringan dari bagian-bagian yang saling terkait. Karena masyarakat pada dasarnya akan selalu bergerak ke arah interaksi yang mempersatukan. Integrasi merupakan bentuk dasar interaksi masyarakat. Namun, bukan berarti dalam masyarakat tidak ada ketegangan-ketegangan dan konflik antar warga. Ketegangan dan konflik akan terus terjadi dalam masyarakat. Namun, ketegangan tersebut akan lenyap, jika masyarakat berada dalam keseimbangan (Kahmad 2006: 57).

Menurut Duerkheim, integrasi diartikan sebagai keadaan keseimbangan. Sebab kajian sesungguhnya dari sosiologi, yaitu fakta sosial tertentu secara umum yang mencangkup keseluruhan masyarakat dan berdiri serta terpisah dari manifestasi individu. Fakta sosial hanya dapat dilihat melalui konformitas individu-individu kepadanya. Karena fakta sosial menjelaskan tiga macam karakteristik. Pertama, gejala sosial bersifat eksternal terhadap individu. Kedua, fakta itu memaksa individu. Menurutnya, individu dipaksa, dibimbing, didorong atau dengan cara tertentu dipengaruhi oleh pelbagai tipe fakta sosial dalam lingkungan sosialnya (Kahmad 2006: 58).

Ketiga, fakta itu bersifat umum dan tersebar secara meluas dalam suatu masyarakat. Jadi dapat dikatakan bahwa fakta sosial itu milik bersama bukan sifat

individu. Meskipun fakta sosial tidak dapat dilihat secara individu, namun struktur aturan-aturan kebudayaan ini nyata bagi individu yang perilakunya ditentukan oleh fakta sosial. Sebab fakta sosial memiliki eksistensi yang independen dalam masyarakat (Jones 2010: 45).

Parson juga mengembangkan teori struktur fungsional dengan model *ekuilibrium*. Menurut Parson, sistem sosial yang berlaku bagi masyarakat ada empat macam, yaitu penyesuaian, pencapaian hasil, persatuan atau keutuhan dan pemeliharaan. Fase-fase tersebut memberikan sumbangan dan fungsinya secara keseluruhan untuk mempertahankan eksistensi mereka. Jika stabilitas terganggu, akan tetapi dibiarkan maka akan menimbulkan ketidakstabilan dalam kehidupan masyarakat (Tambaruka 1999: 98). Setelah kedatangan Belanda di pulau Bangka, stabilitas masyarakat Bangka terganggu karena tidak tercapainya suatu persatuan dan keutuhan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya ketidakstabilan dalam masyarakat Bangka.

Parson memberikan asumsi-asumsi mengenai ketertiban dan keserasian, maka gejala yang tertib dan tidak serasi dengan mudah digolongkan ke dalam kategori abnormal atau patologis. Asumsi inilah kemudian mendapat kritikan tajam dari Lockwood, mekanisme-mekanisme yang menyebabkan terjadinya konflik tidak dapat dicegah. Contoh dalam kasus pertentangan antara elit tradisional di pulau Bangka dengan kolonial Belanda.

Teori konflik merupakan anti tesis dari teori struktur fungsional. Menurut Lockwood, konflik merupakan perselisihan atau permusuhan antara individu dan kelompok dalam masyarakat karena interes terhadap kepentingan tertentu, jika ada tertib sosial maka konflik adalah kenyataan yang melekat pada masyarakat (Tambaruka 1999: 102). Sebab konflik terjadi diakibatkan adanya dualisme kelas sosial yang saling bertentangan sebagai akibat ketidakadilan dalam pembagian aset-aset ekonomi. Dalam pembagian ini kelompok proletar selalu dalam pihak menderita, sebab eksploitasi kaum

borjuis menyebabkan timbulnya penderitaan dan kemiskinan. Keadaan inilah yang menjadi pemicu konflik dalam wujud revolusi yang berakibat perubahan (Usman & Kolip 2011: 664-665).

Teori konflik juga mengatakan bahwa konflik itu perlu karena terciptanya perubahan sosial. Perubahan sosial disebabkan adanya konflik-konflik kepentingan. Menurut Marx, teori konflik memandang bahwa sistem sosial dibagi menjadi dua macam, yaitu kelompok penindas dan kelompok yang ditindas. Hubungan kedua kelompok tersebut bersifat eksploitatif. Kelompok berkuasa selalu memberlakukan nilai-nilai dan pandangan atas kelompok yang dikuasai. Hal ini dilakukan oleh kelompok berkuasa agar tidak mengganggu stabilitas sistem yang dijalankan. Namun, kelompok yang ditindas tidak begitu saja menerima kekerasan dari kelompok yang berkuasa. Kemudian kelompok yang ditindas menghimpun diri untuk bersama-sama mengubah sistem sosial yang ada (Tambaruka 1999: 101). Dalam hal ini, masyarakat Bangka yang merasa ditindas oleh pemerintah Belanda melakukan perlawanan kepada para penguasa setempat. Semua ini dilakukan demi terciptanya perubahan dalam masyarakat Bangka ke arah yang lebih baik. Perubahan tersebut, dapat tercapai jika adanya seorang pemimpin yang membela rakyat.

Menurut Weber, munculnya seorang pemimpin dalam suatu masyarakat yang membangun karena ia memiliki sifat karismatis, yaitu sifat yang timbul karena kesaktian atau kekuatan yang dianggap luar biasa yang melekat atau seseorang yang menurun sebagai warisan dari leluhurnya. Karisma ditentukan dari pengakuan para pengikutnya. Karisma yang dimiliki tersebut sehingga para pengikutnya senantiasa menaati dan tunduk terhadap pemimpin tersebut, karena pemimpin tersebut dipandang sebagai suatu kewajiban moral (Abdullah 1997: 40).

Weber mengklasifikasi kepemimpinan menjadi tiga jenis otoritas. Pertama otoritas karismatik, yaitu berdasarkan jabatan dan kewibawaan pribadi. Otoritas karismatis dapat

bertahan selama dapat dibuktikan keampuhannya dalam masyarakat. Sebagai seorang pemimpin politik dan tokoh agama Islam di pulau Bangka, Depati Amir memiliki karisma yang tinggi di hadapan rakyat. Hal ini terlihat dari kemampuannya dalam memobilisasi massa untuk ikut berperang melawan Belanda. Kedua, otoritas tradisional, yaitu dimiliki berdasarkan pewarisan. Sebagai otoritas tradisional sehingga Depati Amir diangkat sebagai depati di pulau Bangka menggantikan posisi ayahnya Depati Bahrin. Ketiga, otoritas legal-rasional yang dimiliki berdasarkan jabatan dan kemampuannya (Abdurrahman 2007: 30). Otoritas legal-rasional Depati Amir dapat dibuktikan dengan adanya pengakuan dirinya sebagai depati di pulau Bangka. Rakyat melihat Depati Amir merupakan seorang sosok pemimpin yang tegas dan disegani. Hal ini dikarenakan kemampuan politik yang dimiliki oleh Depati Amir. Kemampuan tersebut terlihat ketika ia menjadi seorang pemimpin perang gerilya di pulau Bangka.

Menurut Guevera, ada dua macam bentuk perang yang dilakukan oleh seseorang. Pertama, suatu perjuangan yang melingkupi tentara tetap yang besar jumlahnya dalam bernegara. Kedua, perjuangan melawan kekuasaan negara (kolonial maupun bukan kolonial) yang berbasis di daerah pedesaan yang penduduknya sedikit. Tujuan ideologi yang mengilhami adalah tujuan ekonomi yang ditentukan oleh hasrat kepemilikan tanah (Guevera 2005: 4-5).

Seorang pejuang dan panglima perang harus memiliki pengetahuan yang baik mengenai daerah yang akan dilakukan penyerangan. Jalan-jalan masuk dan jalan-jalan untuk meloloskan diri ketika dalam keadaan yang tidak terduga, tempat bersembunyi yang baik agar mendapat dukungan dari rakyat. Pejuang gerilya melaksanakan aksinya di daerah liar yang penduduknya sedikit. Daerah tersebut lebih memudahkan seorang pejuang gerilya untuk melakukan perombakan struktur daerah tersebut (Guevera 2005: 5). Seperti peristiwa perang Bangka yang dipimpin oleh Depati Amir. Pulau Bangka yang dikelilingi oleh hutan belantara sehingga mempersulit pasukan Belanda untuk

menyerang balik pasukan yang dipimpin oleh Depati Amir. Namun di sisi lain, sangatlah menguntungkan Depati Amir dan pasukan karena mempermudah mereka melarikan diri.

Dari beberapa teori di atas, maka dapat dikatakan bahwa Depati Amir memiliki peran penting dalam perang melawan kolonial Belanda di pulau Bangka. Hal ini terlihat ketika Depati Amir menjabat sebagai depati di pulau Bangka, baik secara politis maupun sosiologis. Selain itu, Depati Amir juga merupakan seorang tokoh agama Islam, yang memiliki karisma sehingga sangat ditakuti oleh pemerintah Belanda. Oleh karena itulah Depati Amir diangkat oleh rakyat menjadi panglima perang untuk melawan Belanda.

Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, dengan model penelitian pustaka (*library research*), mula-mula peneliti akan mengkaji literatur-literatur yang relevan dengan penelitian tentang “*Peranan Depati Amir dalam Perang Melawan Kolonial Belanda Tahun 1848-1850 di Pulau Bangka*” dalam bentuk *library research*.

Menurut Kartodirjo, penggambaran mengenai suatu peristiwa sangat tergantung pada pendekatan, yaitu dari segi mana kita memandangnya, dimensi mana yang diperhatikan, unsur-unsur mana yang diungkapkan (Kartodirjo 1992: 4). Dalam konteks ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan dalam penulisan tesis, yaitu:

- a. Pendekatan historis, yaitu proses pengujian dan penguasaan secara kritis terhadap rekaman masa lampau (Gottschalk 2008: 48). Pendekatan historis dalam tulisan ini dimaksud untuk mengetahui kenyataan sejarah yang melatarbelakangi lahirnya peranan Depati Amir dalam perang Bangka.

- b. Pendekatan sosiologis dipergunakan dalam penggambaran tentang peristiwa masa lalu, tentu di dalamnya akan terungkap segi-segi sosial dari peristiwa yang dikaji. Untuk mengetahui seberapa jauh jalannya suatu gerakan sosial itu, maka perlu diungkapkan kondisi struktur sosial, pranata kepercayaan sebagai dasar gerakan, faktor-faktor pendukung atas pencetus gerakan, mobilisasi pengikutnya, tindakan perlawanan dan segi-segi pertumbuhan serta perkembangan dari segala faktor yang menyertai gerakan itu (Abdurrahman 2007: 23-24). Dalam konteks sosiologis, penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk melihat situasi dan kondisi masyarakat pulau Bangka.
- c. Pendekatan politis adalah sebuah pendekatan yang bertujuan untuk mengetahui bermacam-macam kegiatan dalam sebuah sistem negara maupun politik. Menurut Sartono Kartodirdjo, pendekatan politik adalah suatu pendekatan yang mengarah pada struktur kekuasaan jenis kepemimpinan (Kartodirdjo 1992: 15). Dalam konteks politik, penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk melihat bagaimana kepemimpinan Bupati Amir di pulau Bangka.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data atau sumber asli, yakni bukti yang sezaman dengan suatu peristiwa yang terjadi atau kesaksian daripada seorang saksi dengan mata-kepala sendiri ataupun saksi dengan pancaindera yang lain (Gottschalk, 2008:43). Data primer bisa berupa buku, manuskrip, kronik, autobiografi, surat kabar, publikasi umum, surat pribadi, catatan harian, notulen rapat dan sastra (Arif 2011: 37). Dalam penelitian ini, sumber primer yang digunakan penulis

berupa dokumen yang mencatat peristiwa tersebut. Penulis menggunakan naskah yang ditulis oleh F. van Olden tahun 1860 sebagai data primer. Naskah tersebut berjudul “*De Muiterij Van Amir of Banka in 1850*”.

- b. Data skunder adalah tulisan yang berupa sintesis terhadap karya hasil penelitian berupa artikel, sumber internet dan lain-lain (Zulkifli 2001: 126). Dalam penelitian ini sumber skunder yang digunakan adalah semua bahan-bahan yang ditulis di artikel, buku teks yang berkaitan langsung dengan penelitian. Seperti buku karangan Sutedjo Sujitno, Akhmad Elvian, A.A Bakar, Erwiza Erman, Mary F. Somer Heidhues dan lain-lain.

Tehnik Pengumpulan dan Analisis Data

a. Heuristik

Langkah awal dalam penelitian sejarah adalah langkah pengumpulan sumber data (heuristik). Heuristik adalah sebuah langkah berburu dan mengumpulkan berbagai data yang terkait dengan data yang akan diteliti (Suryana 1997: 65). Heuristik dalam penelitian sejarah sangatlah dibutuhkan oleh sejarawan. Meskipun heuristik tidak memiliki peraturan-peraturan umum. Heuristik merupakan keterampilan menemukan, menangani dan memperinci bibliografi atau mengklasifikasikan dan merawat catatan-catatan (Abdurrahman 2012: 104).

Langkah heuristik yang digunakan penulis dalam penelitian adalah mengumpulkan data dengan mengunjungi tempat-tempat yang berhubungan dengan data yang diteliti. Adapun langkah-langkah yang dikunjungi dalam heuristik, antara lain sebagai berikut:

- a. Dalam kunjungan ke Perpustakaan Program Pascasarjana IAIN Raden Fatah Palembang, penulis menemukan buku karangan Abdullah Idi

“Asimilasi Cina Melayu di Bangka (2009) dan Bangka Sejarah Sosial-Cina Melayu (2011).

- b. Dalam kunjungan ke Perpustakaan Sumatera Selatan, penulis menemukan buku karangan A.A Bakar tentang *“Bahrin, Amir, Tikal: Pahlawan Nasional yang tidak Boleh Dilupakan”* (1995). Selain itu, penulis menemukan buku karangan Husni Rahim *“Sistem Otoritas Administrasi Islam”* (1998), buku karangan Bambang Budi Utomo et,al *“Perkembangan Kota Palembang dari Wanua Sriwijaya Menuju Palembang Modern”* (2005), buku karangan Ernesto Guevera *“Perang Gerilya’* (2004), Tan Malaka *“Gerpolek: Gerilya, Politik, Ekonomi “* (2000) dan lain-lain.
- c. Dalam kunjungan ke Museum timah, penulis menemukan tulisan berupa naskah tentang pulau Bangka yang ditulis oleh Haji Idris dengan judul *“Carita Bangka”* (1861). Selain itu, penulis juga menemukan photo-photo beserta penjelasan singkat tentang ditemukan timah sampai adanya perlawanan Depati Amir dan tokoh lokal lain di pulau Bangka dalam melawan intervensi bangsa asing.
- d. Dalam kunjungan ke Perpustakaan Umum Bangka Belitung dan Perpustakaan Daerah Pangkalpinang. Dalam kunjungan tersebut, penulis menemukan buku karangan Mary F. Somer Heidhues dengan judul *“Timah Bangka dan Lada Mentok: Pulau Bangka Abad XVII sd XX”* (2008) dan buku karangan Erwiza Erman *“Kesenjangan Buruh Majikan”* (1995).
- e. Dalam kunjungan ke Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang, penulis menemukan buku karangan Akhmad Elvian *“Perang Bangka Tahun 1812-1851 Masehi”* (2012).
- f. Dalam kunjungan ke rumah keturunan Depati Bahrin (Amsan Abdurrahman Jr dan H. Ilyasak), penulis menemukan buku karangan F. van

Olden “*De Muieterij Van Amir op Banka in 1850*” (1860), buku karangan A.A Bakar ”*Barin, Amir, Tikal: Pahlawan Nasional Jang Tak Boleh Dilupakan*” (1869), makalah seminar yang ditulis oleh Amsan Abdurrahman Jr “*Perjuangan Depati Bahren dan Perlawanan terhadap Belanda dalam Rangka Mengangkat Depati Amir Sebagai Pahlawan Nasional*” (2012) dan kumpulan-kumpulan silsilah Depati Amir.

- g. Penulis mengunjungi para sejarawan (Sa’ad Toyyib, Yusuf Sulaiman, Suhaimi Sulaiman dan Muhammad Rif’at). Dalam kunjungan tersebut, penulis mendapatkan buku karangan Sutedjo Sujitno “*Sejarah Timah di Indonesia*” (1996) dan “*Legenda dalam Sejarah Bangka*” (2011), buku karangan Mhd. Arifin Machmud “*Pulau Bangka dan Budayanya*” (1986), buku karangan Akhmad Elvian “*Setengah Abad Kota Pangkalpinang Sebagai Daerah Otonom*” (2006), ”*Toponim Kota Pangkalpinang*” (2009) dan “*Kota Kapur dalam Lintasan Sejarah Bahari*” (2011), artikel surat kabar Babel pos yang ditulis oleh Akhmad Elvian “*History Tadjaubelah*” (11 Juni 2013) dan artikel surat kabar Bangka pos yang ditulis oleh Ali Usman “*Berawal dari Arsip Kuno*” (30 Juni 2013).
- h. Penulis mengunjungi toko buku, dalam kunjungan tersebut penulis menemukan buku karangan Erwiza Erman “*Dari Pembentukan Kampung ke Perkara Gelap: Menguak Sejarah Timah Bangka-Belitung*” (2009), buku karanga Ania Loomba “*Kolonialisme/Pascakolonialisme*” (2003), buku karangan Soerjono Seokanto “*Sosiologi Suatu Pengantar*” (2010) dan lain-lain.
- i. Penulis mengunjungi rumah Syarifuddin Isa. Dalam kunjungan tersebut, penulis menemukan buku karangan Syarifuddin Isa “*Sejarah Mentok*” (2008).

Metode lain yang digunakan dalam pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Metode studi dokumentasi yaitu sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji dan menafsirkan data-data tersebut berdasarkan sub-sub bahasan (Moleong 2010: 217). Dalam hal ini peneliti menggunakan dokumen berupa buku yang ditulis oleh Akhmad Elvian, A.A Bakar, Erwiza Erman, Sutedjo Sujitno, Mary F. Somer Heidhues dan lain-lain) dan catatan-catatan silsilah Depati Amir. Sumber-sumber tersebut, kemudian diklasifikasi sesuai dengan sub bahasan.

Setelah data diperoleh melalui kepustakaan, langkah selanjutnya adalah mengelompok atau mengkategorikan data-data tersebut berdasarkan sub-sub pembahasan. Langkah ini merupakan upaya untuk pengecekan kembali atas fakta maupun opini. Selain itu tujuan pengkategorian ini agar tidak terjadi kekeliruan dan dapat memudahkan peneliti dalam penyusunan hasil penelitian ini.

b. Verifikasi

Sumber-sumber sejarah telah berhasil dikumpulkan, langkah berikutnya yang harus dilakukan oleh sejarawan adalah memilah dan memilihnya secara kritis. Langkah ini yang disebut dengan kritik sumber (verifikasi). Kritik sumber dilakukan dalam rangka mencari kebenaran (Arif 2011: 37). Akan tetapi, keaslian sumber sendiri belum tentu menjamin baiknya hasil penelitian dengan alasan tehnik yang digunakan kurang relevan (Nazir 1998: 60). Untuk itulah sejarawan harus mengerahkan pikiran, bahkan seringkali sejarawan harus menggabungkan antara pengetahuan, sikap ragu (skeptis), percaya begitu saja, menggunakan akal sehat dan melakukan tebakan. Sebab sumber-sumber sejarah tidak pernah lengkap dan jarang terdokumentasi secara baik, walaupun ada yang terdokumentasi biasanya hanya kebetulan saja. Bahkan tidak sedikit yang

menghilangkan jejak sejarah dan masih banyak informasi sejarah yang bersifat bias dan berat sebelah (Daliman 2012: 65).

1) Kritik eksternal

Kritik eksternal merupakan suatu cara melakukan pengujian terhadap aspek-aspek luar dari suatu sumber sejarah. Kritik eksternal pada dasarnya merupakan suatu penelitian asal-usul suatu sumber sejarah untuk mendapat semua informasi yang mungkin ada dan untuk mengetahui apakah sumber sejarah yang dimaksud telah berubah dari aslinya (Arif 2011: 38).

Dalam langkah kritik eksternal, penulis mengkritik sejumlah dokumen atau tulisan mengenai keadaan pulau Bangka masa Depati Amir yang diperoleh melalui heuristik. Seperti catatan silsilah yang ditulis oleh keturunan Depati Bahrin versi Kupang dan Bangka. Penulis mengkritik keaslian tulisan silsilah tersebut karena nama-nama dari kedua versi tersebut dari segi nama ada perbedaan. Selain itu, penulis mengkritik keaslian sumber yang ditulis oleh F. van Olden. Dalam penulisan tersebut, F.van Olden menulis Depati Amir berdasarkan subjektivitas. Penulis juga, mengkritik penulisan artikel oleh Ali Usman dalam Bangka pos. Ali Usman menjelaskan tentang kematian Depati Amir tahun 1869 berdasarkan surat keputusan dari Residen Belanda. Namun, tulisan tersebut penulis kritik karena kebenarannya tidak dapat dibuktikan.

2) Kritik internal

Kritik internal bertujuan untuk menyelusuri keabsahan tentang kesahihan sumber (kredibilitas). Kredibilitas sumber akan lebih cepat bila ditelusuri berdasarkan proses-proses dalam kesaksian. Oleh karena itu, kritik dilakukan sebagai alat pengendali atau pengecekan proses-proses tersebut dan mendeteksi adanya kekeliruan yang mungkin terjadi (Abdurrahman 2012: 110-111). Dalam proses ini penulis mencoba mengkaji sejauh mana kesaksian sumber yang telah lolos dapat dipercaya. Dalam kritik internal biasanya dilakukan dengan cara penilaian intrinsik dari sumber-sumber tadi dan

memanding-bandingkan kesaksian satu sumber dengan sumber lainnya (Rochmat 2009: 149).

Langkah yang digunakan penulis dalam kritik internal adalah mengkritik buku karangan A.A Bakar "*Bahrin, Amir, Tikal Pahlawan Nasional yang Tidak Boleh Dilupakan*". Dalam buku tersebut, A.A Bakar menjelaskan tentang peranan Depati Amir dalam perang Bangka kurang teratur dalam penulisan, karena A.A Bakar tidak menulis kapan setiap peristiwa itu terjadi maupun cara penangkapan Depati Amir oleh Belanda. Selain itu, kutipan yang digunakan dalam buku tersebut tidak ditulis dan nama-nama pengarang yang digunakan dalam tulisan tersebut terletak di referensi. Buku karangan F. van Olden "*De Muietij Van Amir op Banka in 1850*". Dalam buku tersebut, F. van Olden menulis tentang Depati Amir sebagai seorang pemimpin perang gerilya yang ulung seperti ayahnya Depati Bahrin. Di sisi lain, F. van Olden menulis bahwa Depati merupakan seorang penjarah atau perampok. F. van Olden menulis seperti itu, karena ketika itu ia menjabat sebagai residen di pulau Bangka. Dalam hal ini, penulis mencoba membandingkan buku-buku karangan Heidhues Mery F. Somer, Akhmad Elvian, Sutedjo Sujitno, A.A Bakar, Erwiza Erman dan lain-lain. Dalam buku-buku tersebut tidak menyebut jika Depati Amir sebagai perampok atau penjarah seperti yang ditulis oleh F.van Olden.

c. Interpretasi

Langkah selanjutnya, dalam penelitian sejarah adalah langkah interpretasi. Interpretasi adalah upaya penafsiran atas fakta-fakta sejarah dalam rangka merekonstruksi realitas masa lampau (Daliman 2012: 83). Interpretasi sering disebut dengan analisis sejarah. Dalam hal ini, ada dua metode yang digunakan, yaitu metode analisis yang berarti menguraikan dan sintesis yang berarti menyatukan. Keduanya merupakan metode utama dalam interpretasi. Analisis sejarah bertujuan untuk melakukan sintesis atas sejumlah

fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama dengan teori-teori disusunlah fakta-fakta itu dalam suatu interpretasi yang menyeluruh (Abdurrahman 2007:73). Dalam proses interpretasi sejarah, analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif.

Dalam proses interpretasi, penulis menganalisis beberapa tulisan yang terdahulu. Seperti tulisan A.A Bakar yang menulis tentang peranan Depati Amir dalam perang Bangka. Dalam tulisan tersebut tidak menjelaskan secara rinci mengenai faktor-faktor perlawanan dan peristiwa perang. Untuk itu, penulis menganalisis faktor-faktor perlawanan dan peristiwa perang Bangka yang ditulis oleh A.A Bakar dengan fakta yang diperoleh melalui tulisan sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan Depati Amir (buku karangan Akhmad Elvian, Erwiza Erman, Sutedjo Sujitno dan Mary F. Somer Heidhues dan lain-lain). Selain itu, penulis juga menganalisa catatan silsilah Depati Amir dengan sumber-sumber yang menulis tentang biografi Depati Amir seperti buku-buku yang ditulis di atas. Kemudian baru penulis tafsirkan sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh. Hasil interpretasi tersebut, terbentuklah dengan susunan atau kerangka yang siap untuk ditulis.

d. Historiografi

Fase terakhir dalam metode sejarah adalah historiografi. Historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Hasil penelitian sejarah hendaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian dari awal (fase perencanaan) sampai dengan akhir (penarikan kesimpulan). Dengan adanya penulisan sejarah, maka dapatlah nilai penelitian tersebut. Apakah penelitian itu berlangsung sesuai dengan prosedur yang dipergunakan atau tidak, apakah sumber atau data mendukung penarikan kesimpulan yang memiliki validitas dan realibilitas yang memadai atautkah tidak (Abdurrahman 2007: 76).

Setelah mengumpulkan berbagai sumber data yang diperoleh, lalu sumber-sumber tersebut dikritik dan ditafsirkan sesuai dengan fakta yang diperoleh. Kemudian penulis melakukan proses historiografi. Proses ini dilakukan untuk menarik suatu kesimpulan dalam bentuk historiorafi (penulis). Sebab rekonstruksi sejarah eksis jika hasil-hasil penelitian tersebut ditulis dalam bentuk karya ilmiah maupun non-ilmiah.

Keterbatasan Studi

Dalam setiap penelitian pasti mempunyai kelemahan-kelemahan, di mana kelemahan tersebut ditulis dalam keterbatasan studi. Dalam penelitian ini, penulis menghadapi beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi kondisi dari penelitian yang dilakukan. Keterbatasan tersebut disebabkan oleh:

- a. Waktu yang tersedia untuk menyelesaikan penelitian yang relatif pendek, padahal data yang dibutuhkan sangatlah banyak.
- b. Dana yang dapat disediakan oleh peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini sangat terbatas.
- c. Masa studi yang berlaku dalam penelitian dibatasi.

Keterbatasan dari ketiga aspek di atas sehingga mempengaruhi hasil penelitian ini. Oleh karena itu bahasan penulisan tesis ini "*Peranan Depati Amir dalam Perang Melawan Kolonial Belanda Tahun 1848-1850 di Pulau Bangka*".

Sistematika Penulisan

Sistematika tulisan dalam penelitian yang berjudul "*Peranan Depati Amir dalam Perang Melawan Kolonial Belanda Tahun 1848 di Pulau Bangka*" dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, membahas tentang pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan keterbatasan studi.

Bab kedua, membahas tentang peranan, pengertian perang, prinsip-prinsip umum perang gerilya dan pengertian perang.

Bab ketiga, membahas tentang kondisi objektif pulau Bangka tahun 1848-1850, meliputi kondisi ekonomi, politik, sosial dan budaya serta keagamaan.

Bab keempat, membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan perlawanan Depati Amir terhadap kolonial Belanda dan peristiwa perang Bangka, meliputi biografi Depati Amir, faktor-faktor perlawanan dan peristiwa perang.

Bab kelima, membahas tentang kedudukan dan peran Depati Amir serta pengaruh perang Bangka dalam kehidupan masyarakat, meliputi kedudukan dan peran Depati Amir secara politis dan sosiologis, pengaruh perang Bangka terhadap kehidupan sosial masyarakat.

Bab keenam, simpulan berisi tentang hasil dari penenilitan yang telah dilakukan dan jawaban dari masalah pokok yang menjadi sasaran penelitian serta dilengkapi dengan saran-saran dan rekomendasi.

BAB 2

PERANAN, PERANG, PRINSIP-PRINSIP UMUM PERANG GERILYA

DAN KOLONIAL

Pengertian Peranan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, peranan berasal dari kata peran dan ditambah akhiran an. Peran adalah pelaku sebagai tokoh dalam sandiwara dan sebagainya (Harto 1992: 120). Sedangkan peranan adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pemimpin terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa (Tim Pustaka Phoenix 2009: 652).

Menurut istilah, peranan adalah seseorang yang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya (Soekanto 2010: 217). Sedangkan menurut Parson, peranan merupakan harapan bagi masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban dari pemegang peran dan harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranan atau kewajiban (Berry 1983: 101)

Menurut Gross, Mason dan Mc Eachern, peranan merupakan harapan yang dikenakan individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan merupakan imbalan dari norma-norma sosial atau bisa dikatakan bahwa peranan ditentukan oleh norma-norma yang ada dalam masyarakat (Berry 1983: 99).

Peran atau peranan merupakan pola perikelakuan, peranan mempunyai beberapa unsur, yaitu:

- a. Peranan ideal dirumuskan atau diharapkan oleh masyarakat terhadap status. Peranan ideal merumuskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terkait pada status-status tertentu.
- b. Peranan yang dianggap oleh sendiri. Peranan ini merupakan hal yang oleh individu harus dilakukan pada situasi-situasi tertentu.
- c. Peranan yang dilaksanakan. Peranan ini merupakan peranan yang sesungguhnya dilaksanakan oleh individu di dalam kenyataan, yang terwujud dalam

perikelakuan yang nyata. Peranan yang dilaksanakan secara aktual senantiasa dipengaruhi oleh sistem kepercayaan, persepsi dan harapan-harapan (Soekanto 1988: 26-27).

Menurut Poerwadarminta, peranan adalah “tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa” (Poerwadarminta, 1995: 751). Dapat juga dikatakan, bahwa peranan adalah tindakan yang dilakukan orang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, peranan merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di dalam masyarakat.

Menurut Komarudin, peranan (*role*) memiliki beberapa konsep, yaitu pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status, bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata dan Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada pada dirinya (Komarudin 1994: 768)

Dalam menjalankan peranan, seorang anggota masyarakat ada yang mengalami beberapa permasalahan. Hal itu disebabkan oleh:

- a. Sebagai pemegang beberapa peranan sekaligus, seseorang berhubungan dengan pelbagai pihak yang juga mempunyai pelbagai peranan sekaligus.
- b. Suatu peranan tertentu menghendaki perikelakuan-perikaluan yang berbed-berbeda.
- c. Pemegang peranan merupakan penghubung antara pihak yang memegang kekuasaan dengan pihak yang menjadi pengikut (Soekanto 1988: 28)

Dalam menjalankan peranan, seseorang anggota masyarakat ada yang mengalami beberapa permasalahan sehubungan dengan kedudukan dan peranan sosial, yaitu konflik kedudukan (*status conflict*) dan konflik peranan (*conflict of roles*) serta adanya pemisahan antara peranan individu dengan peranan kelompok (Septiadi & Kolip 2011: 112). Konflik kedudukan dan konflik peranan muncul disebabkan oleh individu yang

memiliki peranan, tetapi individu itu sendiri merasakan tertekan karena dalam menjalankan peranan tidak sesuai dengan yang diberikan oleh masyarakat. Dengan demikian, dia (individu tersebut) tidak dapat melaksanakan peranan dengan sempurna bahkan ia menyembunyikan dirinya dalam lingkaran sosial tersebut.

Pengertian Perang

Menurut kamus bahasa Inggris, perang berasal dari kata *war* atau *the war* (Edwin n.d: 242). Menurut kamus besar bahasa Indonesia, perang yang berarti memiliki makna sebagai permusuhan, pertempuran dan sebagainya dengan senjata antara negara, antara bangsa, perjuangan perkelahian, mengadu tenaga (Tim Pustaka Phoenix 2009: 652).

Menurut istilah, perang merupakan sebuah aksi fisik dan non fisik (dalam arti sempit, adalah kondisi permusuhan dengan menggunakan kekerasan) antara dua atau lebih kelompok manusia untuk melakukan dominasi di wilayah yang dipertentangkan. Perang secara purba di maknai sebagai pertikaian bersenjata. Di era modern, perang lebih mengarah pada superioritas teknologi dan industri. Hal ini tercermin dari doktrin angkatan perangnya seperti "Barang siapa menguasai ketinggian maka menguasai dunia". Namun, secara umum perang berarti "pertentangan" (Suryohadiprojo 2008: 5).

Menurut Clausewitz, perang merupakan benturan antara kepentingan utama yang diselesaikan dengan pertumpahan darah. Hal itulah yang membuat perang berbeda dari konflik-konflik lain. Dapat dikatakan juga, bahwa perang merupakan kelanjutan tindak politik dengan cara lain atau secara lebih eksplisit "hanya kelanjutan tindak politik yang dicampur cara-cara lain (Howard 1983: 52). Sedangkan Perang dalam Islam diartikan sebagai *Qitalu al-Kuffari fi Sabilillahi li I'lai Kalimatillah*, yaitu "memerangi orang-orang kafir di jalan Allah dalam rangka meninggikan kalimat Allah".

Perang dalam Islam memiliki makna yang spesifik yang berbeda dengan makna bahasa. Jadi perang adalah mengangkat senjata untuk melawan atau memerangi orang-

orang kafir dalam rangka membela kehormatan Islam dan kaum Muslimin. Dengan kalimat lain, perang haruslah dilakukan semata-mata dengan niat untuk menegakkan kedaulatan Islam, bukan untuk hal yang lain, seperti berniat menguasai negara lain atau merampas semua yang bukan menjadi haknya atau untuk mendapatkan kedudukan, pujian dan lain sebagainya (<http://www.referensimakalah.com/2012/12/pengertian-perang-dalam-islam.html>. diakses tanggal 25 Januari 2014).

Dapatlah disimpulkan bahwa perang merupakan perlawanan secara fisik dalam bentuk pertempuran bersenjata (pertumpahan darah) dan non-fisik, demi memerangi orang-orang kafir (kaum penjajah) dalam rangka membela kehormatan umat Islam, bukan untuk merampas hak-hak orang lain atau untuk mendapatkan kedudukan dengan cara yang zalim.

Perang menurut Machiavelli memiliki beberapa prinsip, yaitu:

- a. Perang merupakan suatu aktivitas penting di dalam kehidupan politik.
- b. Di dalam perang terdapat eksistensi perjuangan, namun bentuk serta metodenya tidak pasti
- c. Perang harus *short and sharp* demi pencapaian yang pasti agar segala upaya ataupun kerugian tidak sia-sia.
- d. Segala hal harus dilakukan demi tercapainya kemenangan.
- e. Penggunaan kekuatan penuh merupakan prioritas utama dalam perang (<http://www.lepank.com/2012/07/pengertian-strategi-menurut-beberapa.html>. diakses tanggal 25 Januari 2014).

Prinsip-prinsip Umum Perang Gerilya

Hakekat Perang Gerilya

Perang gerilya merupakan perang si kecil atau si lemah melawan si besar atau si kuat. Jika suatu bangsa diserang dari luar, maka ia berusaha membela diri dan menghindari diri dari pukulan musuh. Membela diri itu, berarti meniadakan ancaman dan pukulan

dengan tujuan untuk menghancurkan si penyerang, agar dapat dikalahkan atau dapat membuat si penyerang kesusahan untuk melacak keberadaannya (Nasution 1984: 4).

Dasar perang gerilya adalah maju untuk menghancurkan musuh dan mundur supaya jangan dihancurkan oleh musuh. Inilah dasar perang gerilya. Para gerilya terdiri dari sedikit prajurit dan bersenjatakan, mencamkan dasar maju itu sepenuhnya. Maju dan mundur dijalankan secara sekaligus (Malaka 2000: 57).

Perang gerilya adalah suatu peperangan dari banyak massa. Kesatuan gerilya inti yang bersenjata, pelopor yang bertempur dari kalangan rakyat. Sumber kekuatan kesatuan adalah massa rakyat itu sendiri. Perang gerilya dilakukan oleh pihak yang didukung oleh mayoritas rakyat, meskipun memiliki jumlah senjata yang jauh lebih kecil untuk pertahanan ketimbang penindas (Guevera 2004: 4). Pejuang gerilya sendiri memerlukan bantuan penuh dari rakyat daerah.

Seorang pejuang atau panglima perang harus memiliki pengetahuan yang baik mengenai daerah yang akan dilakukan penyerangan. Jalan-jalan masuk dan jalan untuk meloloskan diri ketika dalam keadaan yang tidak terduga, tempat bersembunyi yang baik agar mendapat dukungan dari rakyat. Biasanya pejuang tersebut melaksanakan aksinya di daerah liar yang penduduknya sedikit. Karena daerah tersebut lebih memudahkan seorang pejuang untuk melakukan rencana perombakan struktur daerah tersebut (Guevera 2005: 4). Jika terjadi suatu hal yang tidak dikehendaki, seperti pihak musuh berani muncul dihadapan lawan. Pasukan lawan harus maju untuk menghancurkan musuh atau mundur supaya jangan dihancurkan musuh. Taktik maju dan mundur yang biasa dikenal dengan dasar perang gerilya (Malaka 200: 57). Di mana dalam peperangan tersebut, siapa yang paling lama sanggup bertahan dalam peperangan tersebut, biasanya akan menang (Effendy 1974: 72).

Ada dua macam gerilya, pertama suatu perjuangan yang melengkapi tentara tetap yang besar jumlahnya dalam negara, seperti yang dilakukan para pejuang Ukraina di

Uni Sovyet. Kedua, perjuangan gerilya melawan kekuasaan negara (kolonial maupun bukan kolonial) yang berbasis di daerah pedesaan (Guevera 2004: 5). Dalam penulisan tesis ini masuk analisis jenis gerilya yang kedua. Apapun tujuan ideologi yang mengilhami perjuangan tersebut. Namun, tujuan ekonomi tidak dapat dipungkiri atas peperangan tersebut.

Ada sebuah dalil penuh dendang yang mengatakan bahwa pejuang gerilya adalah yesuitnya peperangan. Dengan ini dimaksudkan suatu sifat rahasia, tipu muslihat, tak terduga-duga yang telak sekali merupakan unsur hakiki pejuang gerilya. Peperangan selalu merupakan perjuangan di mana masing-masing pihak berusaha memusnahkan lawannya. Di samping, menggunakan kekerasan, mereka akan menempuh pula segala macam tipu muslihat dan siasat untuk mencapai tujuan tadi (Guevera 2004: 6).

Kesatuan gerilya adalah suatu bagian yang berdiri sendiri dan terdapat di daerah yang luas yang berada di luar jangkauan musuh. Karena daerah yang tidak diketahui musuh sangatlah menguntungkan kesatuan gerilya. Hal ini memungkinkan untuk melaksanakan serangan gerilya dengan cara menjamin ketidak-terdugaan dan menjadi kewajiban pejuang gerilya untuk bertindak sedemikian itu (Guevera 2004: 7). Para kesatuan gerilya dengan mudah menyerang musuh di daerah yang dianggap menguntungkan bagi para gerilya. Pejuang gerilya tidak memberikan sedikitpun ketenangan bagi pihak musuh.

Strategi Gerilya

Dalam istilah gerilya, strategi dipahami sebagai analisis sasaran yang hendak dicapai dalam dalam penyorotan situasi seluruhnya dan jalan yang menyeluruh untuk sasaran tersebut. Untuk mempunyai penilaian strategik yang tepat dari sudut pandangan kesatuan gerilya, perlu dianalisis secara fundamental apa yang akan menjadi cara-cara

kegiatan musuh. Ada sejumlah aspek fundamental yang harus dipelajari, misalnya persenjataan dan cara menggunakan senjata (Guevera 2004: 9).

Pejuang gerilya harus menganalisis sumber yang ada pada musuh untuk mencapai sasaran itu: perlengkapan orang-orangnya, kecekatan gerakannya, dukungan massa, persenjataannya, kemampuan memimpin yang dapat diandalkannya. Sebab seorang pejuang perang bersedia memberikan nyawanya demi tercapainya cita-cita yang diinginkan. Para pejuang tersebut, ingin menghancurkan susunan lama dan merubahnya dengan susunan baru agar tercapainya keadilan dan kesejahteraan yang merata bagi mereka (Guevera 2004: 10).

Menurut Clausewitz, strategi terbaik dalam perang adalah menjaga diri selalu dalam keadaan yang sangat kuat, mula-mula pada hal-hal umum dan kemudian pada titik yang menentukan. Dengan alasan, bahwa kekuatan yang unggul selalu memberikan kesempatan terbaik untuk memenangkan pertempuran. Tentu saja diharapkan semua pasukan perang lebih unggul dari lawan. Meskipun pada kenyataannya bahwa tidak selalu pasukan tersebut lebih unggul dari lawan, bahkan kedua belah pihak seimbang (Howard 1983: 64).

Apabila keunggulan dalam hal jumlah tidak mungkin diperoleh. Kekuatan yang ada harus dikerahkan dengan keterampilan yang sedemikian hingga, bahkan dalam ketiadaan keunggulan yang mutlak, keunggulan yang relatif singkat dapat dicapai pada titik-titik yang menentukan. Di sinilah, dapat dilihat bakat kecemerlangan seorang panglima perang dalam merancang strategi yang diperlukan (Howard 1984: 65). Kemampuan untuk mengenali titik-titik yang menentukan sasaran musuh. Maksudnya, menarik pasukan dari front-front atau pos-pos yang tidak terlalu penting. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk melawan pasukan utama musuh yang dianggap kuat. Dengan demikian, strategi yang digunakan oleh seorang panglima perang akan menentukan bagaimana hasil dari peperangan tersebut.

Taktik Gerilya

Siasat maju dan mundur, akan lebih jelas lagi apabila dibentangkan beberapa taktik yang harus dilakukan oleh sang gerilya:

- a. Lakukanlah serangan pura-pura
- b. Jangan bertempur di lapangan terbuka
- c. Mundurlah kalau diserang oleh pasukan yang lebih kuat
- d. Kepung dan hancurkan pasukan musuh yang kecil
- e. Pancinglah musuh ke dalam perangkap
- f. Terkamlah musuh dengan sekonyong-konyong
- g. Pusatkan tenaga ke urat nadi musuh
- h. Sambarlah dengan cepat, seperti kilat petir yang menyambar
- i. Menghilanglah dengan cepat dan tidak kelihatan, seperti topan (Malaka 2000: 57).

Ciri pokok daripada suatu kesatuan gerilya adalah kecekatan gerakannya. Sesuai dengan keharusan keadaan perang sebuah kesatuan gerilya dapat memusatkan tindakannya pada bagaimana meloloskan diri dari suatu pengepungan yang adalah satu-satunya jalan bagi musuh untuk memaksa kesatuan gerilya melakukan suatu pertempuran yang menentukan yang bisa tidak menguntungkan. Pasukan gerilya harus bisa mengubah pertempuran menjadi suatu pengepungan balasan (Guevera 2004: 13).

Dalam perang yang bersifat gerak cepat, kemenangan terakhir itu bisa berlangsung diperoleh dengan memecah belah, mengepung, menawan atau memusnahkan musuh. Meskipun begitu, gerak cepat yang dilakukan harus diorganisir oleh kaum gerilyawan dengan baik dan tepat. Dengan tujuan untuk menyerang musuh sampai ke akar-akarnya (Malaka 2000: 30).

Karakteristik perang kecekatan gerak ini dinamakan minuet. Kesatuan gerilya mengepung sebuah posisi musuh, suatu pasukan yang sedang bergerak maju. Misalnya, kesatuan ini mengepungnya secara sempurna dari ke empat penjuru angin, dengan lima atau enam orang pada setiap tempat. Pertempuran dimulai dari sudut mana saja dan kemudian mengundurkan diri dengan selalu mempertahankan adanya jarak yang terlihat serta memulai penyerangan dari sudut lain (Guevera 2004: 14).

Ciri pokok lain dari gerilya adalah kemeluran, kemampuan untuk menyesuaikan diri pada segala keadaan dan untuk mengubah segala kejadian dalam aksi menjadi keuntungan baginya. Keunggulan metode bertempur klasik, pejuang gerilya mencari taktiknya sendiri pada setiap menit dalam pertempuran dan selalu mencengangkan (Guevera 2004: 15). Pertama-tama hanya ada kedudukan yang melar, tempat khusus yang tidak dapat dilewati musuh dan tempat untuk mengelabui musuh. Hal ini, disebabkan oleh kedudukan yang dipertahankan kaum gerilya, yang telah dipilih berdasarkan penyelidikan daerah secara teliti sekali.

Tehnik bersembunyi dalam penghadang di sepanjang jalan-jalan untuk meledakkan ranjau dan memusnahkan sisa-sisa musuh adalah salah satu yang paling menguntungkan untuk memperoleh amunisi dan senjata. Musuh yang tergerebek tidak menggunakan amunisinya dan tidak mempunyai waktu untuk melarikan diri dengan begitu menggunakan sejumlah kecil amunisi memperoleh hasil yang besar (Guevera 2004: 19).

Bagian fundamental taktik gerilya adalah perlakuan terhadap rakyat di daerah. Bahkan perlakuan terhadap musuh adalah penting. Norma yang harus dipakai adalah ketidak-meluran yang mutlak pada saat menyerang. Suatu ketidak-meluran total terhadap semua unsur hina yang dipakai untuk mata-mata dan pembunuhan gelap oleh musuh dan pengampunan sepenuh mungkin bagi serdadu musuh yang ke medan perang (Guevera 2004: 20).

Dapat disimpulkan bahwa taktik gerilya merupakan suatu hal yang sangat penting bagi seorang gerilyawan. Dengan taktik gerilya yang baik, diharapkan seorang panglima perang diharapkan mampu mengalahkan musuh ataupun membuat musuh menjadi terpecah belah. Dalam hal ini, taktik yang digunakan adalah kecekatan gerakannya. Jika, kecekatan gerak dapat diorganisir dengan baik maka akan dapat menangkap musuh sampai ke akar-akarnya.

Pengertian Kolonial

Istilah kolonial berasal dari kata Romawi "*Colonia*" yang berarti "tanah pertanian atau pemukiman". Istilah ini mengacu kepada orang Romawi yang bermukim di negeri-negeri lain, tetapi masih mempertahankan kewarganegaraan mereka (Loomba 2003: 2). Menurut bahasa Indonesia, kata kolonial berasal dari kata koloni yang bermakna tanah jajahan (Muda 2006: 320). Kolonial adalah berhubungan dengan sikap jajahan: pemerintahan, mendirikan benteng dan menguasai jalur pelajaran di kepulauan itu (Depdiknas 2005: 582).

Menurut istilah kolonial adalah penaklukan dan penguasaan atas tanah dan harta benda rakyat lain dengan cara perdagangan, penjarahan, negoisiasi, perang, pembunuhan massal dan perbudakan (Loomba 2003: 2). Sedangkan menurut Effendy, kolonial merupakan suatu sistem di mana suatu negara menjalankan politik pendudukan dengan paksa terhadap wilayah atau bangsa lain. Sifat kolonial adalah tamak dan serakah, karena dengan kekuatan yang dimiliki dapat menduduki suatu negeri dengan begitu mudah sehingga memeras bangsa lain (Effendy 2008: 438).

Menurut pemikiran Marxis, bahwa paham kolonialisme dibagi ke dalam dua bagian, yaitu kolonialisme lama (prakapitalis) dan kolonialisme modern (kapitalisme Eropa). Kolonialisme modern tidak hanya mengambil upeti, harta benda dari negara-negara taklukan, tetapi juga mengubah struktur perekonomian mereka, Menarik mereka

ke dalam hubungan kompleks dengan negara-negara induk, sehingga terjadi arus manusia dan sumber daya alam dari koloni dengan negara-negara kolonial. Arus ini melahirkan dua arah yaitu, budak-budak dan buruh kontrak (Loomba 2003: 4).

Penduduk yang terjajah dan penjajah itu sama-sama berpindah. Hal itu disebabkan:

- a. Penduduk terjajah bukan saja sebagai budak-budak, tetapi juga sebagai buruh kontrak.
- b. Tuan-tuan penjajah sebagai pegawai-pegawai pemerintahan, serdadu, saudagar, staff, misionaris dan lain-lain (Loomba 2003: 5).

Kolonialisme Eropa menggunakan berbagai tehnik dan pola dominasi, masuk ke dalam sebagian masyarakat-masyarakat atau hanya melibatkan kontak yang relatif di permukaan dengan sebagian masyarakat-masyarakat lain, Semua itu menghasilkan ketimpangan ekonomi yang diperlukan bagi pertumbuhan kapitalisme dan industri Eropa (Loomba 2003: 5). Di sisi lain, dominasi kolonial melibatkan banyak sekali penindasan dan paksaan. Dengan demikian, kadang-kadang kolonial dianalisis sebagai sebagai suatu proses yang tidak melibatkan relaan dari yang terjajah. Meskipun masyarakat kolonial bekerja antara suatu kerelaan yang sebagian ikhlas dan sebagian pura-pura (Loomba 2003: 41).

Menurut Babha, kehadiran kolonial selalu bersifat ambivalen, terpecah antara menampilkan dirinya sebagai asli dan otoritatif dengan artikulasinya yang menunjukkan pengulangan dan perbedaan. Otoritas kolonial merongrong diri karena tidak dapat mereplikasi diri dengan sempurna. Hal tersebut terlihat dengan adanya kesenjangan yang menandakan bahwa wacana kolonial yang dijalankan gagal sehingga terjadinya perlawanan (Loomba 2003: 229).

Perlawanan dari kaum terjajah sebagai salah satu bukti adanya sikap antikolonial masyarakat yang terjajah terhadap kaum penjajah. Perlawanan menandakan

bahwa masyarakat sadar bahwa para kolonial harus dilawan sampai ke akar-akar sehingga tidak ada lagi kaum yang tertindas. Sebab antara kaum yang terjajah dan penjajah tidak independen antara satu dengan yang lain (Loomba 2003: 230).

BAB 6

SIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, kemudian dianalisis dan diuraikan dalam beberapa bab sesuai dengan rumusan masalah tentang peranan Depati

Amir dalam perang melawan kolonial Belanda tahun 1848-1850 di pulau Bangka, dari uraian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, perlawanan yang dipimpin oleh Depati Amir melawan kolonial Belanda dilatarbelakangi oleh adanya penindasan dan ketidakadilan yang dirasakan oleh penduduk Bangka dan para buruh kasar yang bekerja di penambangan serta hilangnya peran elit tradisional dalam pemerintahan di pulau Bangka. Penindasan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda kepada rakyat Bangka, seperti pemberlakuan sistem kerja paksa kepada penduduk Bangka khususnya umat Islam. Mereka tidak diberi upah atas apa yang dikerjakan. Penindasan tersebut mengakibatkan kemiskinan dan perekonomian rakyat Bangka berada di bawah kekuasaan Belanda. Sedangkan bagi golongan elit tradisional, seperti Depati Amir melakukan perlawanan kepada Belanda disebabkan adanya rasa ketidakadilan. Sebab sudah seharusnya pemerintah Belanda memberikan hak kepada Depati Amir dan keluarga sebagai ahli waris dari Depati Bahrin sampai adanya finah yang dilontarkan pemerintah Belanda bahwa Depati Amir melakukan perampokan atau penjarahan terhadap parit-parit di pulau Bangka. Hal ini dilakukan Belanda supaya rakyat membenci Depati Amir.

Kedua, untuk memperbaiki keadaan penduduk pulau Bangka ke arah yang lebih baik, maka dibutuhkan seorang pemimpin yang tangguh dan memiliki kedudukan yang tinggi. Kriteria tersebut cocok untuk Depati Amir. Karena secara politis Depati Amir tidak lagi menjabat sebagai depati di pulau Bangka. Namun, secara sosiologis masyarakat masih menganggap Depati Amir sebagai depati. Selain itu juga, Depati Amir sebagai tokoh agama di daerah tempat tinggalnya. Kedudukan tinggi dan karisma yang dimiliki oleh Depati Amir sehingga ia ditunjuk oleh rakyat sebagai panglima perang yang tangguh dan pemberani. Dalam peperangan itu Depati Amir menggunakan strategi perang gerilya dengan memobilisasi masa di daerah pedalaman sehingga mempersulit musuh untuk melakukan perlawanan balik kepada Depati Amir dan

pasukan. Depati Amir mengajak masyarakat Bangka, khususnya umat Islam untuk ikut berperang atas nama agama. Sebab peperangan tersebut merupakan suatu kewajiban dan misi yang harus dilaksanakan oleh umat Islam untuk membela harga diri agar mereka tidak diinjak-injak oleh kaum kafir (Belanda). Untuk memberantas pemberontakan Depati Amir dan pasukan, pemerintah Belanda mendatangkan beberapa kali pasukan lengkap dengan persenjataan perang dari luar pulau Bangka.

Keempat, perang yang dipimpin oleh Depati Amir membawa pengaruh yang besar terhadap kehidupan penduduk pribumi pulau Bangka. Sistem kerja paksa yang dijalankan oleh pemerintah Belanda telah dihapuskan dan pemerintah Belanda mulai membentuk kampung-kampung sehingga lebih tertata dan rapi dengan mendirikan jalan setapak. Selain itu, penduduk pribumi pulau Bangka mulai mendirikan tempat peribadatan dan pemerintah Belanda sudah memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk pribumi pulau Bangka serta mulai memberi gaji kepada kepala dusun atau kepala kampung.

Saran-saran

Berdasarkan apa yang telah diungkapkan di atas mengenai “Peranan Depati Amir dalam perang melawan kolonial Belanda tahun 1848-1850 di pulau Bangka”, penulis perlu untuk memberikan saran berkenaan dengan hasil penelitian tersebut. Pertama, perlawanan atau pemberontakan yang dipimpin oleh Depati Amir merupakan suatu peperangan yang dilatarbelakangi oleh adanya penindasan dan ketidakadilan yang dirasakan oleh penduduk pulau Bangka. Setelah adanya penguasaan sistem pemerintahan pulau Bangka oleh pemerintah Belanda sehingga rakyat hidup dalam kemiskinan. Peperangan tersebut membawa pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat Bangka, karena pemerintah Belanda membuat berbagai kebijakan-kebijakan baru. Untuk itu, sebagai generasi penerus bangsa sudah seharusnya mengisi kebebasan

yang diperoleh dengan cara menuntut ilmu, membaca dan menanamkan semangat cinta tanah air kepada masyarakat Bangka agar tidak kembali dijajah oleh bangsa asing.

Rekomendasi

Berdasarkan studi yang telah dikaji berkenaan dengan kontribusi Depati Amir dalam perang melawan kolonial Belanda di pulau Bangka Tahun 1848-1850. Untuk itu penulis mengharapkan dan merekomendasi penelitian selanjutnya untuk mengkaji secara lebih komprehensif peran Depati Amir dalam dakwah Islam dan perang dalam melawan kolonial Belanda di Nusa Tenggara Timur.